

EVALUASI PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) BIDANG SARANA INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Elda Lahesti ¹, Ema Sapitri ²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
e-mail: eldalahesti688@gmail.com

Abstract: *The Inhil Jaya Advanced Village Program (DMIJ) can be said to be quite implemented in accordance with what was planned in the Bird Island District of Indragiri Hilir Regency, this can be seen from the Inhil Jaya Advanced Village Program (DMIJ) that has been implemented, namely: Active community participation in participating in the planning, implementation, financing utilization, maintenance and development process of development results. According to Moleong (2009) qualitative research is research that intends to understand the phenomenon of what is experienced by the subject of research, behavior, perception, motivation, Action, etc. holistically by means of description in the form of words and language, in a special context that is natural and by utilizing various natural methods. The focus of research in this case based on the introduction that has been described using the theory of Gratitude in Surmayadi (2005: 79) states three important elements in the implementation process, namely: The existence of programs or policies implemented by the Target group, namely the targeted and determined community groups will receive benefits from the program, change or increase the implementation element (implementor) of both organizations and individuals to be responsible for obtaining the implementation and supervision of the implementation process..*

Keywords: *Implementation, program, district, Pulau Burung.*

Abstrak: Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dapat dikatakan cukup terlaksana sesuai dengan yang direncanakan pada Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini dapat dilihat dari Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang telah terlaksana, yaitu: Aktifnya partisipasi masyarakat dalam ikut proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan. Menurut Moleong (2009) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Focus penelitian dalam hal ini berdasarkan pendahuluan yang telah dijabarkan menggunakan teori Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan Unsur pelaksanaan (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggungjawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Kecamatan, Pulau Burung.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur fisik sebagai suatu sector vital dalam mencapai pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Infrastruktur menurut Grigg (1998) diartikan sebagai akumulasi komponen fisik meliputi transportasi, pngairan drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik yang berguna memenuhi kebutuhan masyarakat baik dasar social, maupun ekonomi yang tercakup dalam system fisik (Pambudi dan Pramujo 2022). Pada pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan mempunyai peranan penting, harus dikelola dan dikembangkan secara serius dan terus menerus untuk mewujudkan perekonomian nasioanl yang berkeadilan, berkesejahteraan, berkesinambungan, dab berlanjutan. Pembangunan infrastuktur dilakukan untuk memajukan daerah bahkan negara karena dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dapat menciptakan kemajuan di bidang ekonomi dan social suatu daerah (Ajawaila, Rompas, dan Tulus 2021).

Pembangunan dalam Todaro (2006) adalah suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik dari bidang social maupun ekonomi (Wulandari dan Tulis 2022). Dalam Peraturan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) meliputi dana desa bersumber dari APBN sebagaimana dijelaskan oleh Perarutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan pemerintah desa berhak menyelenggarakan pemerintahannya.

Menurut Sukardi bahwa Implementasi program merupakan bagian evaluasi yang objek satu program atau lebih menjadi prioritas suatu Lembaga Pendidikan atau diklat (Wulandari dan Tulis 2022). Implementasi program merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsungnya dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Implemtasi program dapat dilakukan dengan menganalisis, menilai dan melihat pencapaian target program.

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dapat dikatakan cukup terlaksana sesuai dengan yang direncanakan pada Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini dapat dilihat dari Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang telah terlaksana, yaitu:

1. Aktifnya partisipasi masyarakat dalam ikut proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan. Meskipun pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terlambat dalam proses pengesahannya.
2. Laporan kegiatan kemajuan pembangunan sesuai dengan target yang direncanakan, walaupun keterlambatan pengesahan APBDes menyebabkan keterhambatan dalam proses programnya.
3. Factor cuaca dapat menyebabkan terhambatnya pekerjaan karena akses jalan yang masih tanah dan jarak kabupaten ke kecamatan cukup jauh.

Seperti yang dijelaskan keterlambatan pengesahan APBDes menjadi factor utama dalam pembangunan Kecamatan Pulau Burung sesuai dengan waktunya ditetapkan begitu juga dengan kendala akses jalan yang masih tanah dan jarak kabupaten ke kecamatan cukup jauh.

Untuk permasalahan yang telah peneliti jelaskan diatas, peneliti mengambil judul **“Evaluasi Program Desa Maju Inhil Jaya (Dmij) Bidang Sarana Infrastuktur Di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir”**.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Pembangunan dan Pembangunan Desa

Siagian mendefinisikan pembangunan adala suatu rangkaian usaha pertembuhan dan perubahan yang secara sada oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan dalam menuju modernitas (Novan, Sumampouw, dan Undap 2018). Sedangkan Moejiarto (2007) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan kea rah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana” (Rukayat et al. 2021).

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bakan pembangunan dengan *westernisasi*. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pad aspek perubahan, dimana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup, karena masing-masing mempunya latar belakang yang berbeda.

2. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir

Pulau Burung merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang berada dalam wilayah administrative Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang memiliki luas 531,22 km^2 atau sekitar 53,122 ha yang terdiri dari 15 desa/kelurahan (Qurani, Sanudin, dan Fawzi 2022). Jarak tempuh ibukota kabupaten adalah 117 km dari ibu kota provinsi adalah 192 km. akses menuju Pulau burung dapat ditempuh melalui ibukota kabupaten yaitu Tembilahan. Dapat ditempih melalui perjalanan laut sekitar 4 jam perjalanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Dalam pendekatan penelitian kualitatif digunakan karena dapat mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif. Penelitian kualitatif menurut David Williams (1995) adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah (Putra, Yudha, dan Hakim 2022). Menurut Moleong (2009) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, dan lain-lain secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Adhimah 2020). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono menyebutkan bahwa metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Ali, Arif, dan Anggraini 2022).

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat menggambarkan kenyataan dengan menggunakan kata-kata dan Bahasa yang digambarkan secara deskriptif. Pada umumnya penelitian kualitatif menggunakan penelitian studi kasus, yang memusatkan suatu objek untuk memperoleh keterlibatan dari semua pihak yang tersangkut.

Focus penelitian dalam hal ini berdasarkan pendahuluan yang telah dijabarkan menggunakan teori Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- 2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- 3) Unsur pelaksanaan (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggungjawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut (Rumamb, Sumampow, dan Sampe 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Pulau Burung dalam Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dapat dikatakan cukup terlaksana. Dimulai dari penyusunan rencana yang mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan guna membangun dan membuat rencana pembangunan. Peran aktif masyarakat disini dapat terlihat seperti melibatkan masyarakat dalam Musrenbang, yang dimana masyarakat dapat mendengarkan, menghadiri, memberikan pendapat, dan ikut serta terlibat dalam penyusunan rencana. Dari penyusunan rencana ini menghasilkan RPJMDes, mendapatkan usulan masyarakat, dan penyusunan RKPDes, yang dilanjutkan penyusunan desain RAB (Arifin 2022).

Dalam Penetapan rencana yang dimana menjadi wewenangnya pemerintah Kecamatan Pulau Burung dikategorikan cukup terlaksana. Seperti yang pengunjungan Bupati Indragiri Hilir H. M. Wardan pada Sabtu 13 Agustus 2022 lalu, pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan keluhan masyarakat terutama dibidang infrastruktu yang ada dan dihadapi masyarakat. Bupati mengatakan persetujuan tentang kenaikan insentif RT/RW dan BPD Desa se-kabupaten Indragiri Hilir untuk Tahun 2023 (Ali et al. 2022).

Dimana pelaksanaan rencananya melakukan revisi kegiatan APBDes yang dimana menurut Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021 yang dimana jika memiliki jumlah penduduk 616.347 jiwa maka akan mendapatkan alokasi dasar setiap desa dengan nominal Rp. 801.576.000,00. Sedangkan perubahan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total APBDes dengan bobot 50% dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50%.

Pelaksanaan rencana dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Mengacu pada UU Desa dan Permendagri No. 114 tahun 2014 diatas, maka sesungguhnya pemerintah desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah disebut otonomi desa (Muttaqin 2021). Adapun tujuan pengaturan desa sebagaimana ditegaskan pada pasal 4 UU Desa merupakan indikator terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah Kecamatan Pulau Burung melibatkan masyarakat dalam Musrenbang yang membahas tentang pelaksanaan pembangunan infrastuktur.

KESIMPULAN

Peran aktif masyarakat disini dapat terlihat seperti melibatkan masyarakat dalam Musrenbang, yang dimana masyarakat dapat mendengarkan, menghadiri, memberikan pendapat, dan ikut serta terlibat dalam penyusunan rencana.

Dimana pelaksanaan rencananya melakukan revisi kegiatan APBDes yang dimana menurut Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021 yang dimana jika memiliki jumlah penduduk 616.347 jiwa maka akan mendapatkan alokasi dasar setiap desa. Sesungguhnya pemerintah desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimah, Syifaful. 2020. "Peran orang tua dalam menghilangkan rasa canggung anak usia dini (studi kasus di desa karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan-Sidoarjo)." *Jurnal Pendidikan Anak* 9(1):57–62. doi: 10.21831/jpa.v9i1.31618.
- Ajawaila, Laurencia G., Welson Y. Rompas, dan Femmy M. G. Tulusan. 2021. "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara." *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi* VII(104):19–26.
- Ali, Mahfut, Anggia Arif, dan Dewi Anggraini. 2022. "ANALISIS KEDISIPLINAN KERJA KARYAWAN DIKANTIN MAITREYAWIRA MEDA." 386–92.
- Arifin, Mohamad. 2022. "PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) BIDANG SARANA INFRASTRUKTUR DI DESA BANGUN HARJO JAYA KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR."
- Muttaqin, Haris Al. 2021. "KAPABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (DESA KEMUNINGSARI LOR KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER)." 1–15.
- Novan, Mamonto, Ismail Sumampouw, dan Gustaf Undap. 2018. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)." *Jurnal Eksekutif* 1(1):1–11.

- Pambudi, Andi Setyo, dan Bambang Pramujo. 2022. "PERAN DANA TRANSFER KHUSUS BAGI PEMBANGUNAN BIDANG IRIGASI PASCABENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH." *JURNAL KEBIJAKAN PEMERINTAHAN* 5(1):20–28.
- Putra, Alif, Pratama Yudha, dan Lutfiyah Hakim. 2022. "PENERAPAN TATA TERTIB SEKOLAH UNTUK MEMBANGUN." *JURNAL AL-NAQDU* 1–7.
- Qurani, Ika Zahara, Sanudin Sanudin, dan Nurul Ihsan Fawzi. 2022. "Kontribusi Pertanian Berkelanjutan di Lahan Suboptimal Terhadap Aspek Lingkungan dan Sosial-ekonomi di Kecamatan Pulau Burung, Provinsi Riau." *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 27(1):132–40. doi: 10.18343/jipi.27.1.132.
- Rukayat, Yayat, Ridha Rahim Al'Libani, Ridha Rahim Al'Libani, dan Miftah Ardianto. 2021. "KOORDINASI KELEMBAGAAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MARGALUYU KECAMATAN CIPENDEUY KABUPATENUPATEN BANDUNG BARAT."
- Rumamb, Joshua R., Ismail Sumampow, dan Stefanus Sampe. 2021. "Sistim Pengelolaan Data Dan Tata Penyuratan di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Governance* 1(2):1–10.
- Wulandari, Selvia, dan Riamona Sadelman Tulis. 2022. "PRISIP MANAJEMEN DALAM PROSES PEMBAGUNAN INFASTRUKTUR DI KABUPATEN KATINGAN (Studi Di Desa Tumbang Lahang) Jurnal Administrasi Publik (JAP)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 8(2):148–61.